



SALINAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS,  
FISHERIES AND FOOD SECURITY* (CTI-CFF) INDONESIA TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) CTI-CFF Indonesia, perlu disusun Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) Indonesia Tahun 2018-2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan *The Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49);
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
  3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 174);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY* (CTI-CFF) INDONESIA TAHUN 2018-2020.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) Indonesia yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia.

- (2) Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia memuat program dan kegiatan untuk periode tahun 2018-2020.
- (3) Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia terdiri atas:
  - a. perencanaan prioritas bentang laut dan pengelolaan secara efektif;
  - b. pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan sumber daya laut lainnya dapat diterapkan;
  - c. kawasan konservasi laut ditetapkan dan dikelola secara efektif;
  - d. pengukuran capaian adaptasi perubahan iklim; dan
  - e. peningkatan status spesies yang terancam punah.
- (4) Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia ini.

#### Pasal 2

Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia merupakan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir.

#### Pasal 3

Sekretariat Komisi Nasional CTI-CFF Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE  
NASIONAL CTI-CFF INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 369

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Plt. Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Djoko Hartoyo  
NIP. 19681020 199403 1 005

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL  
*CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL  
REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY*  
(CTI-CFF) INDONESIA TAHUN 2018-2020

BAB 1  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas laut Indonesia yang mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 99.093 km, menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah terumbu karang kurang lebih mencapai 2.517.857 Ha dan mangrove 3.616.445 Ha, Indonesia dianugerahi dengan keragaman karang yang sangat tinggi dan keanekaragaman ikan serta kelimpahan sumber daya laut lainnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia bergantung pada sumber daya laut dan pesisir sebagai mata pencaharian mereka dan sumber utama pangan, terutama dari perikanan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 20% berasal dari industri kelautan dan perikanan. Sumber daya laut berada di bawah ancaman serius yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim dan praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan. Perikanan merupakan salah satu sumber pangan dan sumber pendapatan terakhir karena meningkatnya pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja yang terbatas, kurangnya lahan dan permodalan serta laut merupakan *open access*, jumlah nelayan meningkat lebih dari 40% selama 10 tahun terakhir. Hal ini memicu penangkapan ikan yang berlebih dan merusak terhadap sumber daya dengan menggunakan sianida dan pengeboman ikan. Perubahan iklim global dan pembangunan fisik telah menambah kerentanan kondisi sumber daya laut dan pesisir serta kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi Indonesia di abad ke-21 adalah Indonesia menjadi poros maritim dunia. Penegasan ini telah menjadi agenda prioritas utama karena Indonesia adalah negara yang paling strategis yang menghubungkan 2 (dua) samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menindaklanjuti program "Trisakti & Nawa Cita" yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa laut sebagai masa depan bangsa. Oleh karena itu, kemitraan regional penting dan serius diperlukan sebagai langkah maju menuju pengembangan *Grand Maritime Strategy*.

Lebih dari 7 (tujuh) tahun keanggotaan di CTI-CFF, Indonesia semakin menyadari bahwa CTI-CFF menjadi pelopor multi-kemitraan di wilayah *Coral Triangle* untuk memperluas kancah diplomasi regional melalui kerjasama di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Indonesia dan 5 negara lainnya harus bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang luar biasa dan memastikan perlindungan sumber daya laut di tingkat regional sesuai dengan tujuan Rencana Aksi Regional/*Regional Plan of Action* (RPOA). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2009-2014, masing-masing negara anggota telah menyelesaikan *National Plan of Action* (NPOA) dan konsisten melaporkan capaiannya dalam pertemuan tahunan para pejabat senior (*Senior Official Meeting*, SOM). Untuk itu, NPOA masing-masing negara anggota harus diperbarui setiap 5 (lima) tahun dan selanjutnya RPOA diperbaharui setiap 10 tahun.

## 1.2. Rencana Aksi Nasional

Pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tahun 2014 sesuai dengan NPOA pertama 2009-2014. Tujuan dan sasaran telah dikembangkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang terkait dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan.

Untuk melanjutkan program-program tersebut, sebelumnya NPOA perlu ditinjau dan dikembangkan secara menyeluruh untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi telah dihasilkan. Hal ini merupakan

kerangka kerja (*framework*) dalam menyusun NPOA baru melalui penyesuaian dan pertimbangan dengan mengacu pada capaian tujuan NPOA sebelumnya.

NPOA meliputi tata letak, struktur dan target yang ditetapkan dalam RPOA. Seperti halnya RPOA, NPOA terdiri dari 2 (dua) bagian, pertama mencakup komitmen menyeluruh khususnya untuk posisi dan kondisi Indonesia. Kedua, menjabarkan komitmen khususnya terkait dengan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target yang disepakati dalam RPOA tersebut. NPOA terdiri dari target pada setiap tujuan, agenda prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan dijabarkan ke dalam *output* dan tenggat waktu. Aksi prioritas dan kegiatan yang terukur diidentifikasi dan disepakati melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal. Terkait dengan target di setiap tujuan, kegiatan tersebut menjadi kekuatan dalam mencapai setiap tujuan. Ruang lingkup kegiatan meliputi penilaian, monitoring, penelitian, pengembangan kapasitas, pelibatan masyarakat/swasta, serta penerapan peraturan dan kebijakan.

### 1.3. Komite Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF (NCC) Indonesia dan delapan Kelompok Kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP 9/Menko/Maritim/III/2016. Pembentukan Komite dan Kelompok Kerja tersebut bertujuan untuk memastikan target dan capaiannya. Kelompok kerja juga melakukan rangkaian kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dapat diimplementasikan secara nyata yang berdampak positif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Institusi terkait ditunjuk sebagai pemimpin untuk memfasilitasi dialog dan diskusi dalam setiap tujuan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memegang peran penting dalam kelompok kerja. Kelompok kerja bekerja sama dengan para *stakeholder* termasuk Organisasi Internasional, Organisasi non-

Pemerintah Nasional dan Lokal (TNC Indonesia, WWF Indonesia, CI Indonesia, CTC, RARE Indonesia, CIFOR Indonesia, WCS Indonesia, Reef Check Indonesia, Yayasan Terumbu Karang Indonesia), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Perguruan Tinggi (Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Universitas Pattimura Ambon), dan pakar/ahli dalam mengembangkan kegiatan berdasarkan indikator yang terukur di tingkat regional.



## BAB 2 PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN PELAKSANAAN

Berikut prinsip-prinsip pedoman pelaksanaan kegiatan *Coral Triangle Initiative* (CTI):

### Prinsip 1:

CTI harus mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan berkeadilan. Tujuan dan kegiatan CTI harus mengatasi 2 (dua) hal, yaitu pengurangan kemiskinan (misalnya ketahanan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir) dan konservasi keanekaragaman hayati (misalnya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari spesies, habitat, dan ekosistem).

### Prinsip 2:

CTI harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan data perikanan, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan pengurangan kemiskinan harus berbasis pada tujuan dan pelaksanaan kegiatan.

### Prinsip 3:

CTI difokuskan pada tujuan kuantitatif dan pelaksanaannya harus disetujui oleh pimpinan pemerintahan pada tingkat tertinggi. Untuk itu, tujuan kuantitatif harus terukur dan terkait dengan pelaksanaan yang spesifik dan capaian yang realistis. Kerangka kerja harus ditetapkan dengan mendefinisikan kemajuan pencapaian tujuan tersebut. Tujuan harus mencakup tingkat nasional dan regional. Indikator harus diadopsi untuk menentukan target dan kerangka waktunya.

### Prinsip 4:

CTI merupakan forum yang ada saat ini dan akan datang untuk meningkatkan implementasinya. Forum relevan yang telah ada harus digunakan untuk menunjang implementasi kegiatan di bawah CTI. Hal ini termasuk misalnya, komisi tri-nasional pada Sulu-Sulawesi Sea Marine Ecoregion (SSME) dan Bismarck Solomon Sea Ecoregion (BSSE); APEC;

ASEAN; Secretariat for the South Pacific Regional Environment Program (SPREP); Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); Arafura and Timor Seas Experts Forum (ATSEF); dan Program for the Environmental Management of the Seas of East Asia (PEMSEA).

Prinsip 5:

CTI harus diselaraskan dengan komitmen internasional dan regional. Tujuan dan kegiatan harus mendukung komitmen internasional dan regional yang sudah dibuat di bawah instrumen hukum yang terkait dan proses multilateral yaitu, SSME, Convention on Biological Diversity, Millennium Development Goals, ASEAN, APEC, Pacific Islands Forum, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Regional Fisheries Management Organizations, and United Nation Convention on Climate Change (UNFCCC).

Prinsip 6:

CTI harus mengenali sifat lintas batas dari beberapa sumber daya alam laut penting. Kegiatan harus mempertimbangkan sifat lintas batas dari beberapa sumber daya alam laut (berbasis darat dan laut), sumber daya alam tersebut (misalnya, persediaan stok ikan, migrasi penyu dan mamalia laut, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, perdagangan ikan karang hidup). Kegiatan lintas batas dibawah CTI tidak boleh merugikan batas yang telah diakui atau negosiasi batas-batas kedaulatan negara yang sedang berlangsung.

Prinsip 7:

CTI harus mengutamakan prioritas geografi. Kegiatan harus fokus membantu sumber daya dan investasi pada prioritas geografi tersebut (misalnya, "bentang laut" skala besar membutuhkan perhatian khusus, diidentifikasi melalui proses penilaian *eco-regional*).

Prinsip 8:

CTI harus inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa kelompok pemangku kebijakan harus terlibat aktif dalam CTI, termasuk

pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta, lembaga donor bilateral, lembaga multilateral, masyarakat adat dan lokal, masyarakat pesisir, dan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Prinsip 9:

CTI harus mengakui keunikan, kerapuhan dan kerentanan ekosistem pulau.

### BAB 3

#### KOMITMEN INDONESIA UNTUK MENCAPAI KEBERHASILAN CTI-CFF

Negara-negara *Coral Triangle* (CT6) telah sepakat bahwa RPOA sebagai acuan untuk pelaksanaan *Initiative* di negara masing-masing. Secara khusus, negara-negara CT6 menyetujui perjanjian untuk mencapai 5 (lima) tujuan utama CTI-CFF melalui Pengembangan NPOA dan RPOA. Indonesia telah menyetujui 5 (lima) tujuan yang berkaitan dengan kegiatan yang tercantum dalam RPOA. Setiap tujuan berisi kebijakan yang akan diambil dari kegiatan dan program sebelumnya, yang sedang berlangsung dan yang direncanakan yang terkait erat dengan tujuan.

Tujuan 1. Perencanaan dan Pengelolaan "Prioritas Bentang Laut".

Laut sebagai ruang yang secara alamiah mengakomodir berbagai aktivitas yang memanfaatkan sumber daya, seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Ruang laut juga merupakan rumah bagi habitat hidup. Kebutuhan untuk mengatur jenis ruang dengan pendekatan yang komprehensif tidak dapat dihindari. Bentang laut dipandang sebagai pendekatan potensial efektif pada skala spasial yang cukup besar yang bermanfaat baik ekologi maupun bagi kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam mengatur ruang laut, batas kedaulatan sering digunakan untuk mengatur wilayah pengelolaan. Sumber daya laut dapat menjangkau sampai di luar batas kedaulatan. Bentang Laut dapat memberikan cakupan geografis untuk tata kelola laut hingga melampaui batas kedaulatan. Hal ini dapat melampaui kedaulatan negara atau di luar kedaulatan otoritas lokal di dalam negeri. Indonesia telah diakui memiliki banyak bentang laut dalam batas kedaulatannya yang terletak di batas kedaulatan lokal seperti Bentang Laut Kepala Burung, Lesser Sunda, dan Sunda Banda.

Target 1: Perencanaan "Prioritas Bentang Laut", meliputi rencana investasi dan pentahapannya.

Perencanaan setiap kawasan prioritas bentang laut difokuskan menjadi investasi besar dan dilaksanakan pada kurun waktu 2018-

2020. Rencana investasi bentang laut secara komprehensif untuk setiap prioritas bentang laut disusun, bersama dengan rencana tahapan investasi secara keseluruhan disetiap negara dengan menguraikan urutan kronologis kegiatan utama dan investasi keuangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan RPOA CTI-CFF.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Perencanaan bentang laut diselaraskan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP (tahun 2020).

Aksi 2. Melakukan identifikasi bentang laut baru (tahun 2020).

Aksi 3. Melakukan identifikasi bentang laut yang berpotensi bermasalah pada lintas batas wilayah laut (tahun 2020).

Target 2: Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sesuai "Prioritas Bentang Laut".

Bentang laut berperan penting bagi keberlanjutan jangka panjang yang menjamin pencapaian hasil ekologi, yaitu membaiknya kondisi terumbu karang supaya sumber daya ikan dan kesejahteraan manusia dapat bertahan lebih lama.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mempertahankan pengelolaan bentang laut untuk memperbaiki kualitas sumber daya laut dan pesisir (tahun 2020).

Aksi 2. Mekanisme pembelajaran dari bentang laut akan direplikasi pada lokasi lain di Indonesia (tahun 2019).

Aksi 3. Memobilisasi pendanaan baru dan dana tambahan untuk mendukung program "Prioritas Bentang Laut" (tahun 2019).

Aksi 4. Implementasi program bentang laut regional Sulu Sulawesi Marine Ekoregion (SSME) dan Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE) dalam wilayah kedaulatan Indonesia (tahun 2019).

Aksi 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas bentang laut (tahun 2020).

Tujuan 2. Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan (EAFM) dan Sumber Daya Laut Lainnya.

Seperti halnya laut di negara lain, laut Indonesia berada atau mendekati maksimum penangkapan hasil perikanan lestari (MSY). Meskipun perikanan menyediakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung untuk sekitar 5 juta orang di Indonesia, penangkapan ikan secara berlebihan merupakan hasil pengamatan yang paling menonjol dalam pembangunan perikanan. Konsekuensi penangkapan ikan secara berlebihan akan berdampak pada bidang sosial, ekonomi, budaya dan ekologi. Dalam bidang ekologis konsekuensi dari penangkapan ikan secara berlebihan seringkali tidak terdokumentasi, kecuali jika menggunakan pendekatan komprehensif dengan menempatkan pentingnya sistem ekologi pada prospek peningkatan total penangkapan hasil lestari. Pendekatan EAFM (*Ecosystem Approach Fisheries Management*) dalam pengelolaan perikanan dianggap pendekatan yang cocok yang ada saat ini.

Pendekatan EAFM, terutama untuk pengelolaan perikanan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Target 1: Tersedianya peraturan legislatif yang merupakan kebijakan untuk mencapai pendekatan pengelolaan perikanan (EAFM).

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan EAFM dalam mendukung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (tahun 2020).

Aksi 2. Melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam memerangi IUU *Fishing* dan isu-isu terkait (tahun 2019).

Aksi 3. Rencana Aksi Nasional yang berasal dari Rencana Aksi Internasional seperti IPOA (*International Plan of Action*) mengenai Kapasitas Penangkapan Ikan (tahun 2020).

Aksi 4. Memasukkan EAFM dan pembayaran jasa lingkungan (*Payment of Ecosystem Services, PES*) dalam komitmen pengelolaan perikanan bilateral dan regional (tahun 2020).

Target 2: Meningkatkan pendapatan, mata pencaharian dan ketahanan pangan untuk menghidupi 50 juta orang masyarakat pesisir yang berasal dari berbagai wilayah melalui program *A New CTI Sustainable Coastal Fisheries and Poverty Reduction Initiative* (COASTFISH).

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Melanjutkan dan mengembangkan program yang terkait dengan peningkatan pendapatan alternatif, termasuk peningkatan kapasitas dan dukungan untuk usaha skala kecil di tingkat masyarakat (tahun 2020).

Aksi 2. Menambah dana dan/atau modal usaha kecil di tingkat masyarakat (tahun 2020).

Aksi 3. Memperkuat informasi pasar secara bersama untuk produk perikanan skala kecil (tahun 2020).

Target 3: Langkah-langkah efektif untuk membantu memastikan pemanfaatan perikanan tuna berkelanjutan.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Memperkuat pengelolaan perikanan tuna (tahun 2020).

Aksi 2. Mendorong partisipasi Asosiasi Tuna (tahun 2020).

Target 4: Tercapainya pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perdagangan ikan karang hidup dan ikan karang hias.

Aksi Prioritas:

Aksi. Mengembangkan dan menerapkan rencana strategis perikanan berkelanjutan untuk ikan karang hidup dan ikan karang hias (tahun 2020).

### Tujuan 3. Penetapan Kawasan Konservasi Laut (KKL)

Kawasan Konservasi Laut (KKL) memegang peranan penting dalam melaksanakan pendekatan pencegahan dan melakukan mitigasi dampak penangkapan ikan di suatu ekosistem. KKL harus ditetapkan dengan pemahaman bahwa ekosistem berubah setiap saat dan beberapa variabel alam yang tetap di dalam proses perencanaan, desain dan pengelolaan. Hal ini karena KKL merupakan bentuk jaminan terhadap kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan dan ancaman lain yang membahayakan keberlanjutan perikanan dan sumber daya lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebuah perhatian khusus muncul atas kurangnya perlindungan pada sistem kelautan di perairan nasional dan internasional, yakni hanya kurang dari satu persen. KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*The World Summit on Sustainable Development, The World Parks Congress and the Covention on Biological Diversity*) telah berkomitmen untuk membangun jejaring secara global daerah perlindungan laut/kawasan konservasi laut pada tahun 2012, termasuk di laut lepas. Prioritas meliputi konservasi keanekaragaman hayati melalui penyelesaian sistem kawasan lindung, khususnya di bioma laut, serta promosi jejaring ekologi dengan pendekatan ekosistem untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati.

Indonesia telah memiliki KKL dan jaringan sistem KKL dengan berbagai tujuan dan ukuran yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal. Sampai saat ini, Indonesia telah mencapai sekitar 19,1 juta hektar KKL dan rencananya akan menetapkan 20 juta hektar pada tahun 2020. Capaian dan sasaran ini harus terkait erat dengan efektivitas KKL dan jejaring MPA yang telah didirikan dan dapat diimplementasikan. Selain itu, disamping informasi, ilmu pengetahuan tentang KKL sudah banyak, perlu penekanan dalam mensintesis beberapa informasi yang menyediakan mekanisme pembelajaran tentang efektivitas pengelolaan jejaring KKL.

#### Target 1: Sistem KKL di kawasan *Coral Triangle* (CTMPAS)

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Menetapkan dan memperkuat strategi nasional (*grand strategy*) Kawasan Konservasi Laut (tahun 2020).



- Aksi 2. Membangun dan memperkuat kawasan konservasi lintas batas dan bekerja sama antar kawasan konservasi yang melintasi batas-batas negara (tahun 2020).
- Aksi 3. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan KKL tentang ancaman, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait (tahun 2020).
- Aksi 4. Menyusun kebijakan pengelolaan KKL berkelanjutan (seperti pembiayaan berkelanjutan) (tahun 2020).
- Aksi 5. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat institusi untuk perencanaan, penetapan dan pengelolaan KKL (tahun 2020).
- Aksi 6. Memperkuat komunikasi, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang KKL (tahun 2020).
- Aksi 7. Mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan yang efektif sistem KKL nasional (tahun 2020).

#### Tujuan 4. Pengukuran Capaian Adaptasi Perubahan Iklim

Seperti negara-negara kepulauan lainnya, perubahan iklim memberikan tantangan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat di Indonesia. Panjang dan waktu musim berubah, frekuensi dan tingkat keparahan banjir, siklon, bersamaan dengan kenaikan permukaan air laut meningkat. Kerentanan sumber daya pesisir dan laut sangat penting dalam konteks adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Adaptasi perubahan iklim memerlukan koordinasi oleh pemerintah daerah dan mitra dalam mengelola perubahan dan lingkungan. Kebutuhan untuk mengadakan perubahan teknologi, partisipasi warga, dan pola pertumbuhan wilayah pesisir merupakan bagian yang sama pentingnya dari perilaku masyarakat pesisir yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan mengakibatkan kerentanan terhadap bencana.

Target 1: Pengembangan dan implementasi aksi dini rencana adaptasi perubahan iklim untuk wilayah laut (*Near-Shore Marine*) dan pesisir.

Aksi Prioritas:

- Aksi 1. Mengidentifikasi dan memetakan daerah Segitiga Karang (*Coral Triangle*) Indonesia pada tingkat kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim dan menghubungkan informasi untuk keanekaragaman hayati dan nilai sosial ekonomi (tahun 2020).

Aksi 2. Menyusun pedoman umum nasional langkah-langkah adaptasi dampak perubahan iklim terhadap laut, ekosistem pesisir dan masyarakat (tahun 2020).

Aksi 3. Merumuskan sistem peringatan dini dan respon terhadap variabilitas cuaca, variabilitas suhu dan perubahan fenomena badai, termasuk pemutihan karang serta merumuskan strategi langsung atau respon cepat pada dampak perubahan iklim terhadap nelayan, seperti dampak dari perubahan pola cuaca dan musim, suhu laut dan badai (tahun 2020).

Aksi 4. Melakukan dan mengembangkan riset strategis yang memberikan informasi penting untuk mengurangi ancaman terutama bagi ekosistem terumbu karang (tahun 2020).

Aksi 5. Peningkatan kapasitas pendidikan, penelitian, dan sistem informasi tentang isu-isu perubahan iklim yang terkait konsekuensi dan langkah-langkah adaptasi (tahun 2020).

Target 2. Membentuk Pusat Jaringan Unggulan Nasional untuk adaptasi perubahan iklim kelautan dan ekosistem pesisir.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengembangkan kebijakan dan melakukan berbagai penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi, biaya dan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung (tahun 2020).

Aksi 2. Mengembangkan Pusat Unggulan Nasional adaptasi perubahan iklim kelautan dan ekosistem pesisir (tahun 2020).

#### Tujuan 5. Peningkatan Status Spesies yang Terancam Punah

Luasnya perairan Indonesia telah membawa persepsi bahwa lautan adalah sumber dari sumber daya yang tak terbatas. Banyak negara melihat lautan sebagai sumber yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Populasi dari banyak spesies, mengalami penurunan pada tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Sejumlah spesies laut terancam punah dari jenis hewan laut seperti paus, dugong, dan penyu. Ancaman tersebut sulit untuk diketahui selama biota laut tersebut tidak terlihat seperti hewan di darat. Hewan laut bahkan lebih rentan terhadap masalah seperti kerusakan habitat dan eksploitasi secara berlebihan. Kegiatan terrestrial yang terus menerus dapat mempengaruhi kehidupan laut, seperti penurunan drastis dalam populasi hiu spesies tertentu di Indonesia akibat konsumsi sirip hiu secara berlebihan. Selain itu, spesies penyu yang bertelur di darat sering kehilangan tempat penetelurannya akibat pembangunan pesisir. Masalah ini berkaitan erat dengan aktivitas manusia dan pemulihannya tidak mudah.

Dasar pemikiran di atas sebagai dasar perencanaan NPOA untuk konservasi spesies terancam punah. Aksi/kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan NPOA 2009-2014 serta RPOA. Dalam NPOA ini, fokus pada perlindungan spesies yang bermigrasi dan memiliki berbagai siklus selama hidupnya. Diharapkan bahwa tindakan/kegiatan yang disebutkan di bawah ini dengan kriteria spesifik, terukur, disepakati, realistis dan tata waktunya *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely* (SMART). Ada sedikit perubahan dari aksi/kegiatan di NPOA ini sebagian mengenai spesies tertentu. Dari pelaksanaan NPOA sebelumnya, pada kurun waktu 2018-2020 menekankan konservasi spesies hiu, penyu dan mamalia laut. Spesies lainnya seperti pari, rumput laut dan dugong juga termasuk dalam aksi/kegiatan tersebut, seperti melindungi dugong dan melindungi habitatnya (rumput laut). Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan status biota laut yang terancam punah dan memulihkan kembali fungsi ekosistem laut.

Target : Tersusun dan terlaksananya rencana aksi pengelolaan dan konservasi spesies terancam punah.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Kajian Status Spesies (tahun 2020).

Aksi 2. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi hiu dan pari (tahun 2020).

Aksi 3. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi penyu (tahun 2020).

Aksi 4. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi mamalia laut (tahun 2020).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE  
NASIONAL CTI-CFF INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Plt. Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Djoko Hartoyo  
NIP. 19681020 199403 1 005

SALINAN LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR TAHUN  
 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL  
*CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL  
 REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY*  
 (CTI-CFF) INDONESIA TAHUN 2018-2020

RENCANA AKSI NASIONAL  
 CTI-CFF INDONESIA TAHUN 2018 – 2020

TUJUAN 1 : PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN "PRIORITAS BENTANG LAUT"

Target 1 : Perencanaan "Prioritas Bentang Laut", meliputi rencana investasi dan pentahapannya.

Aksis Prioritas:

Aksi 1. Perencanaan bentang laut diselaraskan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Melakukan serangkaian pertemuan ahli terkait penyelarasan pengelolaan Bentang Laut dan pengelolaan perikanan	Jakarta	Konsep harmonisasi antara Bentang Laut dan pengelolaan perikanan (WPP)	APBN	DJPRL-KKP (DJPT-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, Kemlu, LIPI)	2018 - 2020
2	Data pendukung untuk harmonisasi WPP pengelolaan kolaboratif dan pengelolaan Bentang Laut.	Jakarta	Seri dataset terkait dengan kriteria untuk menyelaraskan pengelolaan Bentang Laut dan pengelolaan perikanan (WPP)	APBN	DJPRL-KKP (DJPT-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, Kemlu, LIPI, TNC dan CTC)	2018 – 2020
3	Mengembangkan proyek percontohan menyelaraskan Bentang Laut dan Perikanan pengelolaan (WPP)	WPP 715	Model penyelarasan pengelolaan Bentang Laut dan pengelolaan perikanan (WPP)	APBN	DJPRL-KKP (DJPT-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, Kemlu, LIPI)	2018 – 2020
4	Memfasilitasi diskusi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menyelaraskan terkait rencana kerja perikanan, Perencanaan Ruang Laut, dan KKL	1. WPP 715: Laut Arafuru, Ambon 2. WPP 715: Lokasi Meeting: Manokwari	Rekomendasi dan konsep tentang sinkronisasi perikanan, rencana kerja terkait MSP, dan MPA	APBN	DJPRL-KKP (DJPT-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, Kemlu, LIPI)	2018 – 2020

Aksi 2. Melakukan identifikasi bentang laut baru (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pembangunan Rencana Tata Ruang Laut untuk Bentang Laut prioritas potensial	1. Laut Jawa 2. Laut Banda 3. Laut Natuna 4. Laut Flores 5. Laut Sawu 6. Laut Maluku 7. Laut Aru 8. Laut Seram 9. Laut Bali 10. Laut Halmahera 11. Makassar 12. Sunda 13. Malaka 14. Tomini 15. Bone 16. Cendrawasih	Rencana Tata Ruang Laut dari 16 Bentang Laut prioritas	APBN	DJPRL-KKP , DJPT-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, Kemlu, LIPI, BPRSDMKP KKP	2018 - 2020
2	Penyusunan RZWP3K Provinsi	34 Provinsi	Rencana Tata Ruang Laut di 34 Provinsi	APBN dan APBD	Kemendagri, DJPRL-KKP, Kemenko Maritim, BIG, Pushidros AL, LIPI	2018 - 2018
3	Melakukan pendataan keanekaragaman hayati dan sumber daya laut	Bentang Laut Banda, Lesser Sunda, Bentang Laut Kepala Burung	Seri dataset terkait dengan kriteria untuk merampingkan pengelolaan Bentang Laut dan pengelolaan perikanan (WPP)	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF, TNC, WCS, CTC, CI)	2018 - 2020
4	Pengumpulan data dasar (survei cetacean) sebagai masukan untuk desain jaringan KKL Maluku.	Provinsi Maluku	Model penyelarasan pengelolaan Bentang Laut dan pengelolaan perikanan (WPP)	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF, TNC, WCS, CTC, CI)	2018 - 2020
5	Mendukung <i>profiling</i> dari adat dan lindung komunitas kawasan laut penting dan ekosistem pulau kecil di Sunda Banda Bentang Laut.	Sunda Banda	Rekomendasi dan konsep tentang sinkronisasi perikanan, rencana kerja terkait MSP, dan MPA.	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF)	2018 - 2020
6	Hydrooseanografi, ASL Indonesia, survei pesisir dan berlabuh untuk navigasi keselamatan.	WPP 573, WPP 713, WPP 714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718	Konsep Harmonisasi Antara Bentang Laut	APBN	Pushidros TNI AL, DJPRL-KKP ; Ditjen Hubla-Kemenhub, Kemenko Maritim	2018 - 2020

7	Pemetaan pada kabel dan pipa bawah laut dan Pulau Buatan	Semua WPP	dan Pengelolaan Perikanan (WPP)	APBN	Pushidros TNI AL, DJPRL-KKP Ditjen Hubla-Kemenhub, Kemenko Maritim	2018 - 2020
8	Pemetaan pada daerah yang dibatasi dan berbahaya.	Semua WPP		APBN	Pushidros TNI AL, DJPRL-KKP Ditjen Hubla-Kemenhub, Kemenko Maritim	2018 - 2020

Aksi 3. Melakukan identifikasi bentang laut yang berpotensi bermasalah pada lintas batas wilayah laut (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pengumpulan data dasar tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya laut	Bentang Laut Arafura	Serangkaian data keanekaragaman hayati dan sumber daya laut	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF)	2018 - 2020
2	Pendataan migrasi spesies untuk mendukung identifikasi dan deliniasi Bentang Laut dengan isu-isu lintas batas potensial.	1. Area SSME dan BHS: Cetacean, 2. Area Sunda Banda: Penyu, Hiu, Manta.	Serangkaian data migrasi spesies (Hiu Paus, Manta, Cetacean, Penyu, Hiu)	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF, TNC dan CI)	2018 - 2020
3	Analisis diagnostik Rencana Aksi strategis pengembangan Bentang Laut.	Bentang Laut Arafuru	1. Peta tematik ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun) 2. Peta tematik ekosistem pulau kecil 3. Peta tematik air dangkal	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, KLHK dan CTC	2018 - 2020
4	Pemetaan tematik dan integrasi untuk mendukung pengembangan perencanaan tata ruang laut provinsi:					
	a. Pemetaan Mangrove	Nasional	Peta Mangrove Nasional	APBN, APBD dan Non APBN	BIG, KLHK, KKP, Pemda	2018 - 2020
	b. Pemetaan Ekosistem Pulau Kecil	Kepulauan Karimata	Basemap laut	APBN	BIG	2018 - 2020

Target 2 : Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sesuai "Prioritas Bentang Laut".

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mempertahankan pengelolaan bentang laut untuk memperbaiki kualitas sumber daya laut dan pesisir (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pertemuan Tahunan Bentang Laut Nasional	Sulu Sulawesi Bentang Laut, BHS	Isu yang berkaitan pada pemeliharaan pengelolaan Bentang Laut	APBN	DJPRL-KKP	2018 - 2019

Aksi 2. Mekanisme pembelajaran dari bentang laut akan direplikasi pada lokasi lain di Indonesia (tahun 2019).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Bentang Laut Pembelajaran	Lesser Sunda.(TNC, GOI);Laut Banda.(WWF, GOI); Anambas Natuna. (CI Indonesia, Pemerintah Indonesia)	Pembelajaran dari pengelolaan Bentang Laut	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, WWF dan CI)	2018
2	Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut	13 Provinsi	Seri Pelatihan Perencanaan Tata Ruang Laut	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF dan CTC)	2018 - 2020
3	Mengembangkan Pusat Pembelajaran Bentang Laut Sunda Banda	Sunda Banda Bentang Laut	Didirikannya Pusat Pembelajaran Bentang Laut Sunda Banda	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF dan CTC)	2018 - 2020

Aksi 3. Memobilisasi pendanaan baru dan dana tambahan untuk mendukung program "Prioritas Bentang Laut" (tahun 2019).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat waktu
1	Lokakarya Sumber Daya Pendanaan	Leiser Sunda, Laut Banda, Anambas Natuna, Kepala Burung Bentang Laut	Daftar potensi pendanaan untuk mendukung program Bentang Laut prioritas	APBN	Kemenko Maritim	2018 - 2020



Aksi 4. Implementasi program bentang laut regional Sulu Sulawesi Marine Ekoregion (SSME) dan Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE) dalam wilayah kedaulatan Indonesia (tahun 2019).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pemutakhiran data migrasi spesies Penyu dalam Bentang Laut Sulu-Sulawesi	Area SSME	Data migrasi spesies Penyu dalam Bentang Laut Sulu-Sulawesi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, GIZ dan WWF)	2018 - 2020

Aksi 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas Bentang Laut (2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Menyusun pedoman tentang pemantauan dan evaluasi pengelolaan Bentang Laut	Jakarta	Dokumen pedoman tentang pemantauan dan evaluasi pengelolaan Bentang Laut	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim dan DJPRL-KKP	2018 - 2020
2	Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Bentang Laut	Bentang Laut Kepala Burung.	Dokumen rekomendasi	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim dan DJPRL-KKP	2018 - 2020
3		Bentang Laut Sunda-Banda	pada pengelolaan	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim dan DJPRL-KKP	2018 - 2020
4		Bentang Laut Lesser Sunda	Bentang Laut	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim dan DJPRL-KKP	2018 - 2020
5	Pemantauan Dampak	Bentang Laut Sunda Banda	Dokumen hasil pemantauan	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim dan DJPRL-KKP	2018 - 2020

TUJUAN 2: PENDEKATAN EKOSISTEM UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN (EAFM) DAN SUMBER DAYA LAUT LAINNYA

Target 1: Tersedianya peraturan legislatif yang merupakan kebijakan untuk mencapai pendekatan pengelolaan perikanan (EAFM).

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan EAFM dalam mendukung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pembangunan kapasitas untuk Implementasi EAFM di Indonesia	WPP 715, 716, 718	260 orang dilatih EAFM	APBN dan Non APBN	DJPT -KKP	2018 - 2020
2	Lokakarya perilaku untuk melaksanakan Pengelolaan Perikanan EAFM	Jakarta	Terkoordinirnya implementasi EAFM di semua WPP	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020
3	Penilaian kinerja Pengelolaan Perikanan menggunakan indikator EAFM	Semua WPP	Semua WPP dinilai menggunakan EAFM Indikator	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020
4	Mengembangkan Komisi Pengelolaan Perikanan	Semua WPP	Terbentuknya Komisi Pengelolaan Perikanan di seluruh WPP	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020
5	Memperkuat kebijakan EAFM melalui pengembangan dan revisi peraturan tentang Perikanan	Semua WPP	Terbentuknya Komisi Pengelolaan Perikanan di seluruh WPP	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020
6	Melakukan praktek mitigasi tangkapan perikanan skala kecil	Berau	Pemangku kepentingan memahami BMP ( <i>Better Management Practices</i> ) dan HCR ( <i>Harvest Control Rule</i> ) sebagai upaya penurunan hasil tangkapan sampingan	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP dan Mitra (WWF)	2018 - 2020

Aksi 2. Melaksanakan dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam memerangi *IUU Fishing* dan isu-isu terkait (tahun 2019).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat waktu
1	Melakukan kerjasama pengawasan dan patroli terhadap <i>IUU Fishing</i>	WPP 571, 711, 718	Terintegrasinya patroli di WPP 571, 711, dan 718	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020
2	<i>Workshop</i> kerja sama pemberantasan dan pencegahan <i>IUU Fishing</i>	WPP 571, 573, 712, 714, 716, 717	Terlaksananya kerja sama pemberantasan dan pencegahan <i>IUU Fishing</i>	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020

Aksi 3. Rencana Aksi Nasional yang berasal dari Rencana Aksi Internasional seperti IPOA (*International Plan of Action*) mengenai Kapasitas Penangkapan Ikan.

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang <i>IUU Fishing</i>	Jakarta	Terkoordinirnya implementasi NPOA <i>IUU Fishing</i>	APBN	PSDKP-KKP, Satgas 115-KKP, Kemenko Maritim, Bakamla, Polisi Air dan DJPT-KKP	2018 - 2020

Aksi 4. Memasukkan EAFM dan pembayaran jasa lingkungan (*Payment of Ecosystem Services, PES*) dalam komitmen pengelolaan perikanan bilateral dan regional (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab kegiatan	Tenggat Waktu
1	Studi kelayakan pembayaran jasa lingkungan (PES)	WPP 715	Melibatkan pemangku kepentingan di lokasi terpilih untuk pengembangan PES	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020

Target 2: Meningkatkan pendapatan, mata pencaharian dan ketahanan pangan untuk menghidupi 50 juta orang masyarakat pesisir yang berasal dari berbagai wilayah melalui program *A New CTI Sustainable Coastal Fisheries and Poverty Reduction Initiative* ("COASTFISH")

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Melanjutkan dan mengembangkan program yang terkait dengan peningkatan pendapatan alternatif, termasuk peningkatan kapasitas dan dukungan untuk usaha skala kecil di tingkat masyarakat (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengembangkan usaha skala kecil/menengah untuk perikanan tangkap	Semua WPP	Usaha perikanan skala kecil semakin berkembang	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020
2	Melakukan pelatihan untuk pasca panen perikanan skala kecil	27 Provinsi	Meningkatkan pengetahuan UKM perikanan tentang pengolahan produk yang bermutu	APBN	DJPT-KKP, DJPDSPKP KKP dan BRSDMKP-KKP	2018 - 2020

Aksi 2. Menambah dana dan/atau modal usaha kecil di tingkat masyarakat (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengembangkan usaha berbasis perikanan tangkap masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil	Semua WPP	Usaha perikanan di wilayah perbatasan semakin berkembang	APBN	DJPT-KKP dan LPMUKP-KKP	2018 - 2020
2	Mengembangkan perikanan kemitraan bisnis untuk perikanan skala kecil	semua WPP	Pembentukan lembaga pembiayaan yang akan memberikan modal kepada perusahaan dan koperasi untuk membeli hasil tangkapan dari perikanan skala kecil	APBN	DJPT-KKP dan LPMUKP-KKP	2018 - 2020

Aksi 3. Memperkuat informasi pasar secara bersama untuk produk perikanan skala kecil (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Menggabungkan informasi pasar untuk <i>website</i> Produk perikanan skala kecil di Laut Indonesia	Jakarta	Meningkatkan kualitas konten <i>website</i>	APBN	DJPT-KKPDJPDSP KP-KKP, dan Pusdatin KKP	2018 - 2020

Target 3: Langkah-langkah efektif untuk membantu memastikan pemanfaatan perikanan tuna berkelanjutan.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Memperkuat pengelolaan perikanan tuna (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, cakalang, dan Tuna neritik	Semua WPP	Terimplementasi-nya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tuna, Cakalang, Tongkol	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020
2	Adopsi dan pelaksanaan berbagai peraturan internasional dan regional tentang Pengelolaan Perikanan Tuna	Semua WPP	Mengadopsi dan menerapkan berbagai regulasi internasional dan regional tentang Pengelolaan Perikanan Tuna	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020

Aksi 2. Mendorong partisipasi Asosiasi Tuna (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Melakukan Konferensi Tuna Internasional	Semua WPP	Terlaksananya Konferensi Tuna Internasional	APBN	DJPT-KKP	2018 - 2020

Target 4: Tercapainya pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perdagangan ikan karang hidup dan ikan karang hias.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengembangkan dan menerapkan rencana strategis perikanan berkelanjutan untuk ikan karang hidup dan ikan karang hias (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengembangkan <i>roadmap</i> untuk pengelolaan ikan karang di tingkat nasional	Semua WPP	Tersusunnya <i>roadmap</i> pengelolaan ikan karang	APBN	Kemenko KEMARITIMAN, DJPT-KKP	2019

2	Melaksanakan proyek percontohan pengembangan strategi panen dan penerapan ikan karang hidup	WPP 715	Tersusunnya Strategi Panen Ikan karang	APBN	DJPT-KKP	2019
3	Menyusun Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias, Karang Hias dan Tumbuhan Air Hias dan Implementasinya	Nasional	Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias, Karang Hias dan Tumbuhan Air Hias dan Implementasi-nya	APBN	Kemenko Maritim, DJPDSPKP-KKP, DJPB-KKP dan BRSDMKP-KKP	2018 - 2020

### TUJUAN 3: PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI LAUT (KKL)

Target 1: Sistem KKL di kawasan *Coral Triangle* (CTMPAS).

Aksi Prioritas:

Aksi. Menetapkan dan memperkuat strategi nasional (*grand strategy*) Kawasan Konservasi Laut (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Tentukan KKL baru berdasarkan ekologi, keanekaragaman hayati dan perikanan	Sulawesi Utara, Maluku Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Barat	KKL baru ditetapkan	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
2	Diberlakukannya KKL baru	Sulawesi Utara, Maluku Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Barat	Unit Pengelolaan, Rencana Zonasi, Keputusan Menteri tentang KKL	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
3	Mengembangkan strategi untuk KKL dan Jaringan KKL di tingkat Nasional	Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lesser Sunda, Kepala Burung Bentang Laut	Dokumen strategi untuk KKL dan Jaringan KKL tersedia	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
4	Mengintegrasikan data dan status efektivitas pengelolaan KKL dan MPA <i>Networks</i> ke Sistem Nasional <i>database</i>	Semua Lokasi KKL	Data diperbarui dan status Pengelolaan MPA ke Sistem Nasional <i>database</i>	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
5	Mempromosikan Sistem Nasional MPA ke jaringan regional dan global	Semua Lokasi KKL	Buku KKL / publikasi, berbasis web <i>database</i> yang KKL GIS tersedia	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020

Aksi 2. Membangun dan memperkuat kawasan konservasi lintas batas dan bekerja sama antar kawasan konservasi yang melintasi batas-batas negara (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengidentifikasi KKL yang memiliki konektivitas lintas batas (ekologi dan sosial ekonomi).	Laut Sulu Sulawesi	KKL lintas batas diidentifikasi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP , Pemda dan Mitra (TNC, WWF, GIZ)	2018 - 2020
2	Mengembangkan KKL <i>Networks</i> Regional	Laut Sulu Sulawesi	Regional (Lintas Batas) KKL <i>Networks</i> di Seas Sulawesi Sulu ditetapkan	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP , Pemda dan Mitra (TNC, WWF, GIZ)	2018 - 2020
3	Membangun trans-batas Rencana Pengelolaan Jejaring KKL	Laut Sulu Sulawesi	Rencana Pengelolaan Jejaring KKL Lintas batas	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP , Pemda dan Mitra (TNC, WWF, GIZ)	2018 - 2020
4	Penguatan kelembagaan pengelolaan lintas batas KKL dan Jaringan	Laut Sulu Sulawesi	Lembaga co-pengelolaan di lintas batas KKL	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP , Pemda dan Mitra (TNC, WWF, GIZ)	2018 - 2020
5	Mengidentifikasi potensi ancaman (ekologi dan sosial-ekonomi) dari KKL lintas batas baru dan strategi untuk mengurangi dan menghilangkan ancaman	Kawasan lindung lintas batas baru	Laporan dari potensi ancaman dan strategi untuk mengatasi ancaman dari KKL lintas batas baru	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP , Pemda dan Mitra (TNC, WWF, GIZ)	2018 - 2020

Aksi 3. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan KKL tentang ancaman, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Memastikan proses yang sangat partisipatif untuk rencana KKL zonasi dan menggunakan ekologi, sosial ekonomi dan data perikanan untuk mengembangkan rencana zonasi	KKL	Pengelolaan KKL dan rencana zonasi yang di dukung oleh pemangku kepentingan dan masyarakat lokal	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , Pemda	2018 - 2020
2	Mengembangkan dan/atau memperbaiki rencana pengelolaan KKL yang mencakup rencana zonasi KKL	KKL	Rencana pengelolaan KKL di daerah masing-masing	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , Pemda	2018 - 2020
3	Mengidentifikasi ancaman utama untuk KKL dan menerapkan strategi untuk mencegah ancaman tersebut	KKL	Tersusunnya Strategi nasional untuk menurunkan ancaman utama bagi KKL	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , Pemda	2018 - 2020
4	Memastikan penegakan hukum dan langkah-langkah mendesak yang dapat menghentikan eksploitasi ilegal sumber daya dalam KKL	KKL	Penegakan KKL di tempat	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , DJPSDKP-KKP, Pemda	2018 - 2020

5	Melakukan <i>review</i> untuk mekanisme partisipasi pemangku kepentingan dalam kebijakan dan pengelolaan KKL	KKL	<i>Review</i> mekanisme untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan KKL	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , DJPSDKP-KKP, Pemda	2018 - 2020
6	Pelibatan peran masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait di KKL untuk perencanaan dan tata pemerintahan yang partisipatif	KKL	pengelolaan KKL secara kolaboratif terlaksana	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , DJPSDKP-KKP, Pemda	2018 - 2020
7	Mengembangkan sistem pengawasan dan infrastruktur dalam KKL	Nasional	Sistem pengawasan KKL dan infrastruktur	APBN dan APBD	DJPRL-KKP , DJPSDKP-KKP, Pemda	2018 - 2020
8	Pengelolaan Limbah ( <i>Marine Debris</i> ) dan Polusi di MPA	Nasional dan Daerah (165 KKL)	Data, Informasi dan Strategi Pengelolaan Sampah dan Polusi di KKL	APBN dan APBD	Kemenko Maritim, KLHK, DJPRL-KKP , Pemda	2018 - 2020
9	Menyusun Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut	Nasional	Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut	APBN dan APBD	Kemenko Maritim	2018
10	Revisi Perpres 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Laut	Nasional	Perpres tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Laut	APBN	Kemenko Maritim, Kemenhub, KKP, KLHK, Kemen ESDM	2018

Aksi 4. Menyusun kebijakan pengelolaan KKL berkelanjutan (seperti pembiayaan berkelanjutan) (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mempromosikan kebijakan untuk keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan KKL	35 KKL	Kebijakan Pemerintah Nasional dan Kabupaten yang memungkinkan partisipasi masyarakat lokal pada perencanaan dan pengelolaan KKL	APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020
2	<i>Review</i> kebijakan nasional dan lokal / tradisional yang menghambat efektivitas pengelolaan	35 KKL	Nasional dan kebijakan lokal / tradisional untuk mendukung efektivitas pengelolaan KKL	APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020
3	Mengembangkan mekanisme dan kelembagaan <i>trust fund</i> atau pembiayaan berkelanjutan KKL termasuk aturan yang diperlukan, kebijakan, dan langkah-langkah institusional dengan bekerjasama dengan negara lain dan lembaga donor	Nasional (32 Provinsi)	Nasional dan mekanisme kabupaten dan kelembagaan untuk Pembiayaan KKL berkelanjutan	APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020
4	Penyusunan <i>Roadmap</i> Strategi pengembangan KKL di 2020 - 2030	Nasional (32 Provinsi)	<i>Roadmap</i> strategi Pembangunan KKL disusun, termasuk mengusulkan KKL baru di pulau-pulau terluar dalam menanggapi masalah batas trans	APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (RARE)	2018 - 2020

5	Menyusun Keputusan Menteri KP tentang Pemanfaatan KKL untuk Penelitian dan Pendidikan, Pariwisata, dan Perikanan Berkelanjutan	Nasional (32 Provinsi)	Tersusun dan Keputusan Menteri tentang Pemanfaatan KKL untuk Penelitian dan Pendidikan, Pariwisata, Perikanan Berkelanjutan	APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (RARE)	2018
6	Valuasi daya dukung untuk setiap zona	35 KKL	Valuasi kapasitas untuk setiap zona	APBN dan Non-APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020

Aksi 5. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat institusi untuk perencanaan, penetapan dan pengelolaan KKL (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat waktu
1	Pengembangan modul pelatihan untuk staf pengelola KKL (pariwisata berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan basis data)	Nasional	Modul pelatihan yang dikembangkan	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (CTC, RARE)	2018 - 2020
2	Memperkuat kapasitas staf pengelola KKL Nasional dan Daerah di KKL evaluasi efektivitas pengelolaan	Nasional	Kapasitas staf KKL diperkuat	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (CTC, RARE)	2018 - 2020
3	Pertukaran Informasi Kawasan Konservasi Laut Nasional	Nasional	Terlaksananya <i>workshop</i> , seminar, dan pertemuan mengenai Pengetahuan dan Praktik Pengelolaan KKL	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020

Aksi 6. Memperkuat komunikasi, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang KKL (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengembangkan strategi kampanye Nasional untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang KKL.	Nasional	Strategi kampanye Nasional tersedia dan diimplementasikan	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
2	Mengembangkan kampanye strategi Nasional untuk generasi berikutnya	Nasional	Kampanye strategi Nasional untuk generasi berikutnya	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020



Aksi 7. Mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan yang efektif sistem KKL nasional (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Melakukan evaluasi Nasional tentang pengelolaan efektivitas KKL Nasional dan Lokal	Semua Lokasi KKL	Peringkat/hasil efektivitas pengelolaan KKL	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
2	Pemberian penghargaan untuk efektivitas pengelolaan KKL (E - KKP3K)	Nasional	Pengakuan untuk perbaikan dalam efektivitas pengelolaan KKL	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
3	Meningkatkan pengelolaan yang efektif dari KKL yang dipilih	Semua lokasi KKL	35 KKL meningkat kan efektivitas pengelolaan	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP BRSDMKP-KKP dan Mitra (TNC, CI, WWF, RARE, WCS, CTC, Sea-Project)	2018 - 2020
4	Pemantauan berkala pada aspek biofisik, sosial ekonomi dan pemerintahan termasuk perikanan	Semua Lokasi KKL	Tersedianya data dan informasi mengenai status aspek biofisik, sosial ekonomi dan tata kelola	APBN	DJPRL-KKP	2018 - 2020
5	Melakukan monitoring dan pengawasan serta penegakan hukum	Semua Lokasi KKL	Laporan Monitoring dan Pengawasan serta Penegakan Hukum	APBN	DJPRL-KKP dan DJPSDKP-KKP	2018 - 2020
6	Mengintegrasikan data dan status efektivitas pengelolaan KKL dan MPA <i>Networks</i> ke Sistem <i>database</i> Nasional	Semua Lokasi KKL	Data status pengelolaan MPA <i>Networks</i> ke Sistem <i>database</i> Nasional	APBN	DJPRL-KKP dan Pusdatin-KKP	2018 - 2020
7	Meningkatkan dan memperbarui sistem <i>database</i> GIS Nasional berbasis web MPA	Semua Lokasi KKL	KKL berbasis web sistem <i>database</i> GIS Nasional ditingkatkan dan diperbarui	APBN	DJPRL-KKP dan Pusdatin-KKP	2018 - 2020
8	Melakukan verifikasi Nasional dan validasi data dan informasi dari KKL yang ada di Indonesia	Semua Lokasi KKL	Data dan informasi KKL yang ada diverifikasi dan divalidasi	APBN	DJPRL-KKP dan Pusdatin-KKP	2018 - 2020
9	Berpartisipasi dalam CT Atlas	Semua Lokasi KKL	<i>Link</i> dan <i>database update</i> Nasional KKL untuk CT Atlas	APBN	DJPRL-KKP	2018 - 2020
10	Penyerahan Personil, Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Kawasan Konservasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi	Semua Lokasi KKL	Terlaksananya penyerahan P3D	APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, Kemendagri, BKN dan Pemda	2018

TUJUAN 4: PENGUKURAN CAPAIAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Target 1: Pengembangan dan implementasi aksi dini rencana adaptasi perubahan iklim untuk wilayah laut (*Near-Shore Marine*) dan pesisir.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengidentifikasi dan memetakan daerah Segitiga Karang Indonesia pada tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan menghubungkan informasi untuk keanekaragaman hayati dan nilai sosial ekonomi (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Peta Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil	Maluku Tenggara	Data Peta	APBN dan Non APBN	BIG	2018
2	Penelitian tentang dinamika laut dan produksi primer yang berkaitan dengan perikanan	Selat Bali, Laut Banda	Data	APBN dan Non APBN	BPOL BRSDMKP-KKP	2018 - 2020
3	Pemetaan banjir dengan skala 1: 50.000	Seluruh Indonesia	Data Peta	APBN dan Non APBN	BIG	2018 - 2020
4	Sosialisasi tentang keadaan lingkungan laut yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dan perubahan iklim	Bali	Data	APBN dan Non APBN	BPOL BRSDMKP-KKP	2018

Aksi 2. Menyusun pedoman umum nasional langkah-langkah adaptasi dampak perubahan iklim terhadap laut, ekosistem pesisir dan masyarakat (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengumpulkan informasi melalui metodologi <i>Vulnerability Assessment</i> dan alat-alat, dan terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) aktivitas.	Nasional	Dokumen The Third National Communication (TNC)	Non APBN	DJPPI-KLHK	2018
2	Pendataan Iklim Laut Nasional	Nasional	Data TNC tentang Iklim Laut Nasional	Non APBN	DJPPI-KLHK	2018
3	Penyusunan Kebijakan dan Percepatan Pengarusutamaan Agenda isu global kemaritiman tentang Perubahan Iklim	Nasional	Dokumen Kebijakan	APBN	Kemenko Maritim, DJPPI-KLHK dan Mitra (RARE)	2018
4	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penyusunan Pedoman Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	Nasional	Peraturan Menteri LHK Nomor P.33 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3/2016 tentang Penyusunan Pedoman Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	APBN	DJPPI-KLHK	2018
5	Pengembangan metode penghitungan karbon pesisir	Nasional	Pedoman / SOP	APBN dan Non APBN	BRSDMKP-KKP, DJPPI-KLHK, LIPI,	2018

Aksi 3. Merumuskan sistem peringatan dini dan respon terhadap variabilitas cuaca, variabilitas suhu dan perubahan fenomena badai, termasuk pemutihan karang serta merumuskan strategi langsung atau respon cepat pada dampak perubahan iklim terhadap nelayan, seperti dampak dari perubahan pola cuaca dan musim, suhu laut dan badai (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Kegiatan monitoring pesisir menggunakan radar untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir	Nasional	Data dan Informasi	APBN dan Non APBN	BMKG, Pusriskel BRSDMKP-KKP, DJPPI-KLHK, LIPI, BIG, LAPAN, Pushidros TNI AL, BPPT	2018 - 2020
2	Perhitungan musim pergeseran menggunakan data <i>time series</i> .	Selat Makassar, Selat Lombok, Selat Karimata, sebelah selatan Jawa	Data dan Informasi	APBN dan Non APBN	BRSDMKP-KKP	2018 - 2019
3	Kebijakan Nasional pengelolaan kebencanaan maritim.	Nasional	Peraturan Presiden	APBN	Kemenko Maritim, KKP, BMKG, BNPB, BASARNAS, Kemenhub	2018
4	Pengukuran pada parameter indikator kesehatan laut.	Bali, Raja Ampat	Data dan Informasi	APBN	Pusriskel BRSDMKP-KKP, Kemenko Maritim, KLHK	2018

Ket : \*estimasi oleh NCC

Aksi 4. Melakukan dan mengembangkan riset strategis yang memberikan informasi penting untuk mengurangi ancaman terutama bagi ekosistem terumbu karang (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Fenomena identifikasi laut terkait dengan perubahan iklim	Nasional dan Daerah	Data dan informasi	APBN, APBD dan Non APBN	Pusriskel BRSDMKP-KKP, Kemendagri, Pemda	2018
2	Pengukuran potensi pengasaman laut di perairan Indonesia	Nasional dan Daerah	Data dan informasi	APBN, APBD dan Non APBN	Pusriskel BRSDMKP-KKP	2018
3	Studi perubahan tutupan lahan di daerah pesisir dan dampaknya pada ekosistem pesisir dan karbon	Nasional dan Daerah	Data dan informasi	APBN dan Non APBN	Pusriskel BRSDMKP-KKP, KLHK, Kemen ATR,	2018
4	Pembaharuan data kerentanan terumbu karang yang disebabkan oleh perubahan iklim	Nasional	Data Kerentanan Terumbu Karang Nasional	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, DJPPI-KLHK, LIPI, Reefcheck	2018 - 2020
5	pengembangan Konsep <i>eco-mangrove</i>	Nasional	Konsep pengembangan <i>eco-mangrove</i>	APBN dan Non APBN	KLHK, DJPRL-KKP, BRSDMKP-KKP	2018

6	Pengembangan Bioreeftek untuk konservasi terumbu karang dan replikasinya	Nasional	Data Bioreeftek	APBN	BRSDMKP-KKP, Kemenko Maritim	2018 - 2020
7	Pengamatan karang biogeokimia di Indonesia	Nasional	Data karang biogeokimia di Indonesia	APBN dan Non APBN	BRSDMKP-KKP	2018 - 2020

Ket : \*estimasi oleh NCC

Aksi 5. Peningkatan kapasitas pendidikan, penelitian, dan sistem informasi tentang isu-isu perubahan iklim yang terkait konsekuensi dan langkah-langkah adaptasi (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pelatihan penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim	Sondaken, Rappap, Minahasa Selatan	Penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
2	Pengelolaan pengetahuan dan komunikasi mengenai perubahan iklim	Sulawesi Utara	Pengetahuan dan komunikasi mengenai perubahan iklim	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
3	Pembangunan kapasitas kesiapsiagaan bencana di Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Kapasitas kesiapsiagaan bencana	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
4	Peningkatan kapasitas benih rumput laut	Lampung	Kapasitas benih rumput laut meningkat	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
5	Penilaian kualitatif kerentanan terhadap perubahan iklim	Sondaken dan Rappap - Sulut	Kerentanan terhadap perubahan iklim	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
6	Pembangunan kapasitas kesiapsiagaan bencana dan peningkatan sistem kesehatan dan sanitasi	Sondaken, Rappap	Kapasitas kesiapsiagaan bencana dan peningkatan sistem kesehatan dan sanitasi terbangun	Non APBN	DJPPI-KLHK, ADB-RETA	2018
7	APIK (Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim)	Sulawesi Utara dan Maluku	Terbangunnya Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim (APIK)	Non APBN	DJPPI-KLHK, USAID	2018 - 2020
8	Bimbingan teknis untuk adaptasi perubahan iklim	Manado, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Riau, dll	Tersampainya bantuan teknis untuk adaptasi perubahan iklim	APBN	DJPPI-KLHK dan Mitra (RARE)	2018 - 2020

9	Program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	25 Lokasi: Kab.Pulau Morotai (Maluku Utara), Kab. Maluku Tenggara (Maluku), Kab. Lombok Utara (NTB), Kab. Sumba Timur (NTT), Kab. Tanah Laut (Kalsel), Kab. Sambas, Kota Singkawang (Kalbar), Kab. Trenggalek, Kab. Gresik (Jatim), Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Brebes (Jateng), Kab. Pandeglang (Banten), Kab. Bangka Barat (Babel), Kab. Aceh Barat (Aceh), Kab. Agam (Sumbar), Kab. Luwu Utara (Sulsel), Kota Kendari (Sultra), Kab. Gorontalo Utara (Gorontalo), Kab. Kota Waringin Timur (Kalteng), Kab. Kep. Meranti (Riau), Kab. Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kab. Garut, Kab. Pangandaran (Jabar), Kota Bitung (Sulut)	5 aspek utama: sumber daya manusia, pengembangan usaha, sumber daya pesisir, infrastruktur / lingkungan, dan kesadaran bencana dan adaptasi perubahan iklim	APBN	DJPRL-KKP	2018
10	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	34 provinsi	Jumlah sekolah	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP ,	2018 - 2020
11	Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengintegrasikan ketahanan iklim dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat Provinsi	Saburai Jua, Sumba Timur (lanjutan)	Jumlah masyarakat atau desa yang difasilitasi	Non APBN	KLHK dan UNDP	2018
12	Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai program dan alokasi anggaran terkait dengan tindakan prioritas adaptasi perubahan iklim	Sabu Raijua, Sumba Timur (lanjutan)	Jumlah masyarakat atau desa yang difasilitasi	Non APBN	KLHK dan UNDP	2018

13	Memperkuat masyarakat pedesaan pada perubahan iklim	Sabu Raijua	Jumlah masyarakat yang tahan perubahan iklim bertambah	Non APBN	KLHK dan UNDP	2018
----	---	-------------	--	----------	---------------	------

Target 2: Membentuk Pusat Jaringan Unggulan Nasional untuk adaptasi perubahan iklim kelautan dan ekosistem pesisir

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Mengembangkan kebijakan dan melakukan berbagai penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi, biaya dan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Penilaian metode penghitungan kerugian dan kerusakan di daerah pesisir sebagai dampak perubahan iklim melalui identifikasi lapangan dan pengumpulan data	Nasional dan Daerah	Pedoman	APBN	BRSDMKP-KKP	2018 - 2019
2	Pemetaan dan pengukuran stok karbon di hutan bakau dan padang lamun di Indonesia	Calon lokasi: Pulau Karimun Jawa, Pantai Utara Jawa, Sulawesi Utara, Bali, Derawan	Data dan Informasi	APBN	BRSDMKP-KKP	2018 - 2020
3	Analisis layanan ekosistem pesisir dan aspek masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim lokal	Calon lokasi: Pulau Karimun Jawa, Pantai Utara Jawa, Sulawesi Utara, Bali, Derawan	Data dan Informasi	APBN	BRSDMKP-KKP	2018 - 2020
4	Memperkuat sistem pengelolaan sampah	Nasional dan Daerah	Sistem pengelolaan sampah	Non APBN	KLHK, ADB-RETA	2018
5	Memperkuat sistem pengelolaan sampah untuk 3 desa	3 Desa di Sulawesi Utara	Sistem pengelolaan sampah	Non APBN	KLHK, ADB-RETA	2018

Aksi 2. Mengembangkan Pusat Unggulan Nasional untuk adaptasi perubahan iklim kelautan dan ekosistem pesisir (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Memberikan informasi ( <i>database</i> ) untuk memahami sumber daya perikanan dan kelautan dan adaptasi ekosistem pesisir	Bali	Data sumber daya perikanan dan kelautan dan adaptasi ekosistem pesisir	APBN dan Non APBN	BRSDMKP-KKP, Kemenko Maritim	2018 - 2020

TUJUAN 5: PENINGKATAN STATUS SPESIES YANG TERANCAM PUNAH

Target : Tersusun dan terlaksananya rencana aksi pengelolaan dan konservasi spesies terancam punah.

Aksi Prioritas:

Aksi 1. Kajian Status Spesies (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pemantauan pendaratan Hiu dan Pari	Cilacap, Tanjung Luar, Pelabuhan Ratu, Banyuwangi, Sibolga dan Manado	Database pendaratan Hiu dan Pari di tempat	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan Mitra (WWF, WCS)	2018 - 2020
2	Pengumpulan data Nasional Penyu	Nasional	Database Penyu	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK, Pemda dan Mitra (WWF)	2020
3	Mengembangkan pedoman dalam pemantauan Penyu in situ	Nasional	Pedoman pemantauan tempat peneluran Penyu	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK, Pemda dan Mitra (WWF)	2018
4	Pendataan <i>by-catch</i> Penyu dan kajian teknologi mitigasi menggunakan 3 alat tangkap utama ( <i>longline, gill net</i> dan <i>purse seine</i> )	Paloh (Kabupaten Sambas) dan Selayar	Data dan dokumen kajian	APBN dan Non APBN	DJPT-KKP, BRSDMKP-KKP dan Mitra (WWF)	2020
5	Penyusunan Penilaian Spesies Terancam Punah (Hiu, Penyu dan Mamalia Laut)	Nasional	Dokumen laporan <i>assessment</i>	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, LIPI, Kemenko Maritim, BRSDMKP-KKP dan Mitra	2018
6	Penyusunan Rencana Aksi Konservasi Regional Spesies Terancam Punah	Nasional	Dokumen Rencana Aksi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, LIPI, Kemenko Maritim, BRSDMKP-KKP dan Mitra	2018

Aksi 2. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi hiu dan pari (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Menyusun Peraturan Nasional Konservasi Hiu dan Pari	Nasional	Peraturan Menteri KP	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, LIPI, Kemenko Maritim, BRSDMKP-KKP dan Mitra (WCS, CI, WWF)	2018

2	Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hiu dan Pari	Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, LIPI, Kemenko Maritim, BRSDMKP-KKP dan Mitra (WCS, CI, WWF)	2020
3	Mengembangkan kajian alat tangkap/teknik untuk mengurangi <i>by-catch</i> hiu dan pari	NTT	Dokumen hasil kajian	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan WWF	2018
4	Studi pola migrasi Hiu dan Pari	Nasional	Laporan studi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP	2018
5	Penyusunan <i>Non Determined Finding</i> (NDF) Hiu appendix CITES	Nasional	Dokumen NDF	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, DJPT-KKP, LIPI, Kemenko Maritim, BRSDMKP-KKP dan Mitra (WCS, CI, WWF)	2018

Aksi 3. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi penyu (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat waktu
1	Mengesahkan draft NPOA Penyu	Nasional	Surat Keputusan Bersama Menteri KP dan Menteri KLHK untuk NPOA Penyu	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP DJKSDAE-KLHK dan WWF	2018
2	Penegakan hukum untuk mengurangi perburuan dan perdagangan Penyu	Nasional	Laporan penegakan	APBN dan Non APBN	DJPSPDKP-KKP, DJKSDAE-KLHK, Pemda dan Mitra (WCS)	2018 - 2020
3	Sosialisasi Hukum Adat terhadap pemanfaatan Penyu	Nasional	Laporan	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP	2018 - 2020

Aksi 4. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi konservasi mamalia laut (tahun 2020).

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Output	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Mengesahkan draft Rencana Aksi Mamalia Perairan (Pesut, Dugong, Cetacea)	Nasional	Surat Keputusan Bersama Menteri KP dan Menteri KLHK untuk NPOA Mamalia Laut	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK	2018
2	Peningkatan kapasitas dan monitoring serta pembentukan Gugus Tugas Penanganan Mamalia Perairan Terdampar	Nasional	Gugus Tugas Penanganan Mamalia Perairan Terdampar	APBN dan Non APBN	Kemenko Maritim, DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK, LIPI dan WSI	2018 - 2020



3	Studi koridor migrasi Paus	Laut Sawu	Dokumen hasil studi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP dan TNC	2018 - 2019
4	Menyusun pedoman interaksi mamalia perairan di ekowisata bahari	Nasional	Pedoman	APBN dan Non APBN	Kemeko Maritim, DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK, LIPI dan WSI	2018 - 2019
5	Sosialisasi Hukum Adat terhadap pemanfaatan mamalia perairan	NTT	Laporan sosialisasi	APBN dan Non APBN	DJPRL-KKP, DJKSDAE-KLHK, Kemeko Maritim dan TNC	2018 - 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE  
NASIONAL CTI-CFF INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Plt. Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Djoko Hartoyo  
NIP. 19681020 199403 1 005